

PONSEL, GAYA HIDUP, DAN KELAS MENENGAH DALAM NEGARA ORDE BARU: TELAAH AWAL

MOBILE PHONE, LIFESTYLE, AND THE MIDDLE CLASS IN THE NEW ORDER COUNTRY: AN INITIAL STUDY

Wahyudi Akmaliah

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

wahyudiakmaliah@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini kebanyakan orang memiliki ponsel dengan pilihan dan bentuk berbeda. Saat rezim Orde Baru berkuasa, khususnya sejak tahun 1990-an, hanya segelintir kelas menengah yang memiliki ponsel. Tulisan ini memaparkan signifikansi ponsel bagi orang Indonesia dengan memfokuskan pada era rezim Orde Baru. Kehadiran ponsel pada era Orde Baru disambut hangat oleh anggota masyarakat, khususnya kelas menengah Indonesia seiring dengan perubahan sistem ponsel dari analog menuju digital. Alih-alih sebagai alat komunikasi untuk memudahkan pembicaraan, kehadiran ponsel menjadi gaya hidup seperti barang ternama lain yang dikonsumsi. Kehadiran ponsel memunculkan ketegangan kelas menengah dan kelas bawah yang ditandai dengan munculnya aksi kriminal. Aksi kriminal yang penulis maksud bukan tindakan kriminal biasa, melainkan sesuatu yang penulis sebut “*hidup nggayani*” (*lifestyling*), ketidakmampuan seseorang mengonsumsi barang yang lebih mahal, tetapi membeli barang bekas atau mencari ponsel tiruan yang lebih murah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gaya hidup kelas menengah tidak hanya dikonstruksikan sebagai kelas yang mengonsumsi pakaian, musik, dan makanan, tetapi juga terkait dengan tindakan mereka dalam menyikapi ponsel.

Kata kunci: kelas menengah, ponsel, orde baru, hidup *nggayani*, ketegangan kelas

ABSTRACT

Nowadays most Indonesians are in possession of mobile phone with different choices and shapes. During the New Order regime, especially around the 1990s, there were only few Indonesians from the middle class who could have it. This article explains the significance of mobile phone for Indonesians during the New Order regime. The presence of mobile phone in the New Order era was warmly welcomed by most Indonesians, particularly Indonesian middle class, in tandem with the change of mobile phone technology system from analogue to digital. Instead of being a communication tool to make conversations easier, the mobile phone has become the lifestyle of many people just as the other branded items they use. The emergence of mobile phone as lifestyle has then raised the tension between Indonesian middle class and the lower class, indicated by the increase of crimes. The notion of crime in this article does not merely refer to the act of criminality but also what is called ‘lifestyle, the inability of people to afford expensive items, which has led them to buy second-hand items or manage to find the mobile phone’s imitation which is cheaper. This article concludes that Indonesian middle class’s lifestyle has been constructed not only as a class that consumes clothing, music, and food but also their behavior regarding cell phone.

Keywords: middle class, mobile phone, new order, lifestyle, tension between classes

PENDAHULUAN

Saat rezim Orde Baru berkuasa, imajinasi mengenai ponsel tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Indonesia, kecuali kelas menengah atas dari ragam latar belakang tertentu. Selain harga belinya terbilang mahal, pemeliharaan untuk biaya administrasi

dan lain-lainnya pun terbilang tinggi. Orang harus mengeluarkan Rp14 juta untuk membeli nomornya saja. Sementara itu, untuk telepon genggam (telepon seluler, selanjutnya disingkat dengan ponsel) mereka harus mengeluarkan uang Rp14 juta. Total biaya yang harus dibayar adalah 28

juta rupiah. Ini belum termasuk biaya administrasi, abonemen, dan pulsa. Namun, hasrat orang untuk membeli ponsel tidak pernah surut. Hal ini dikuatkan oleh salah satu penjual ponsel berbagai merek di kawasan Tebet yang diliput oleh *Kompas* pada 23 Februari 1994, “Bisnisnya (ponsel) tidak pernah sepi. Permintaan selalu ada, tetapi susahnyanya barang sering habis. Kami tidak pernah menyimpan stok lebih dari satu minggu”. Namun, banyaknya peminat ponsel tidak diimbangi dengan perluasan *Remote Base Station* (RBS) yang dipasang oleh PT Elekterindo Nusantara, perusahaan yang melayani Sambungan Telepon Bergerak Nasional (STBN) dengan jangkauan Jakarta, Bandung, Medan, dan Ujung Pandang (sekarang ibu kotanya bernama Makassar). Akibatnya, harga ponsel menjadi sangat mahal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia, di satu sisi, menjadi gengsi tersendiri bagi orang yang menggunakan.

Studi mengenai ponsel di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Fokus mereka lebih pada kehadiran ponsel dan teknologi ikutan yang muncul pascarezim Orde Baru (Bart, 2009; Lim, 2013). Memang, studi tersebut dapat membantu memetakan penggunaan ponsel, gaya hidup, dan kemunculan publik baru dengan kehadiran media sosial, seperti Facebook dan Twitter di Indonesia yang dijadikan media gerakan sosial. Namun hal ini mengabaikan kehadiran ponsel pada era rezim Orde Baru. Hal itu pun memutus rantai sejarah sosial bagaimana ponsel dikonsumsi dan menjadi gaya hidup bagi kebanyakan kelas menengah Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis, ada tiga hal yang menyebabkan ponsel pada rezim Orde

Baru tidak dilihat sebagai bagian kajian kelas menengah dan studi media dan komunikasi di Indonesia. *Pertama*, awal tahun 1990-an itu muncul televisi swasta, seperti RCTI dan SCTV, akibat privatisasi dan deregulasi kebijakan untuk lebih berpihak kepada pasar (Sen, 1994; Kitley 2000; Ishadi, 2014). Kehadiran dua televisi swasta tersebut memberikan dampak signifikan terkait sumber informasi yang berbeda. Hal ini terjadi karena otoritas tunggal rezim Orde Baru menjadikan TVRI sebagai satu-satunya sumber informasi dan kerap menjadi media indoktrinasi masyarakat terkait dengan program-program pembangunan. *Kedua*, di tengah kehadiran dua stasiun televisi tersebut, hadirnya internet dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia, khususnya kelas menengah terdidik, memberikan asupan informasi baru yang dijadikan modal perlawanan terhadap rezim Orde Baru melalui milis-milis yang terhubung antara aktivis, mahasiswa, dan dosen Indonesia di luar negeri (Lim, 2005 & 2006; Hill & Sen 2005). *Ketiga*, sedikitnya jumlah kelas menengah Indonesia yang menggunakan ponsel. Di satu sisi, maraknya wartel (warung telepon) dan *pager* sebagai alat komunikasi kebanyakan masyarakat Indonesia, membuat studi ponsel menjadi terabaikan. Meskipun sering disebut di dalam penelitian-penelitian, ponsel menjadi bagian dari aksesoris gaya hidup kelas menengah Indonesia.

Meskipun demikian, sebelum kemunculan ponsel, studi mengenai teknologi komunikasi, khususnya telepon (rumah) dan interkom sudah dilakukan oleh Joshua Barker. Berkaitan dengan sejarah sosial telepon rumah, Barker (2002) melacak kemunculannya sejak Hindia Belanda, pemerintahan Soekarno, hingga Soeharto dan

kehadiran interkom. Kehadiran telepon rumah memiliki imajinasi yang berbeda dalam tiga konteks tersebut. Dalam konteks Hindia Belanda, telepon dimaknai sebagai tergantinya budaya tatap muka juga tergantinya pertemuan dengan terbangunnya jaringan komunitas yang terbayang dan membuat mereka bisa mengisolasi diri. Lebih khusus, kehadiran telepon tersebut, bagi perempuan, adalah ruang sosialisasi baru yang membebaskan mereka dari sekat aturan dan pendisiplinan sistem patriarki (Barker, 2002: 162-171). Sementara itu, dalam konteks Presiden Soekarno, telepon (dalam hal ini radio-telepon) adalah benda yang menghubungkan tanah air kolonial Belanda, di satu sisi, sebagai bentuk persaudaraan sesama bangsa, yang dirayakan dengan adanya konferensi di Bandung (Barker, 2002: 173). Bagi rezim Orde Baru, didukung oleh militer dan teknokrat, telepon dimaknai sebagai upaya untuk memperkuat wawasan nusantara. Hal ini menurut Barker (2002: 174), ditandai oleh dua hal penting. *Pertama*, dibangunnya sistem gelombang mikrotelekomunikasi nasional dari Sumatera hingga Papua, dan dari Jawa-Bali. *Kedua*, diluncurkan Satelit Palapa sebagai satu-satunya satelit domestik pertama di negara berkembang. Interkom sendiri diartikan oleh Barker (2008) sebagai ruang publik politik yang ideal tempat orang bebas untuk membicarakan berbagai hal kepada mereka yang memiliki minat yang sama terhadap satu isu dan beberapa isu yang lain. Tidak adanya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai kehadiran interkom ini memperkuat idealitas ruang publik tersebut.

Penjelasan di atas memperkuat

studi yang dilakukan Barker. Tulisan ini menjembatani dan mengisi celah kosong studi-studi mengenai ponsel yang sudah ada pascarezim Orde Baru, dengan memfokuskan pada signifikansi ponsel pada rezim Orde Baru seiring dengan munculnya kelas menengah baru di Indonesia. Penulis mengajukan tiga pertanyaan mengenai hal tersebut dengan memfokuskan tulisan pada era rezim Orde Baru; bagaimana kemunculan ponsel pada era rezim Orde Baru? Bagaimana respons masyarakat seiring kehadiran ponsel tersebut? Apa makna kehadiran ponsel bagi masyarakat Indonesia kebanyakan (khususnya kelas menengah atas)? Kehadiran ponsel pada era Orde Baru disambut hangat oleh anggota masyarakat, khususnya kelas menengah (elite) Indonesia seiring dengan perubahan sistem ponsel dari manual ke analog. Ponsel pun menjadi gaya hidup bagi para penggunanya. Ponsel sebagai gaya hidup ini memunculkan ketegangan kelas dengan munculnya aksi kriminal oleh anggota masyarakat lain, yang penulis sebut sebagai tindakan, dalam bahasa Jawa sebagai “nggayani” (*lifestyling*). Di sini, penanda gaya hidup kelas menengah di Indonesia dapat dilihat tidak hanya pada pakaian, pilihan musik, kendaraan yang digunakan, melainkan juga ponsel yang digunakan.

Untuk memudahkan pembaca, penulis membagi tulisan ini menjadi tiga bagian. Pertama, perkembangan telepon seluler dalam rezim Orde Baru. Sejarah perkembangan telepon seluler mengandalkan pada bahan materi pemberitaan harian nasional *Kompas* pada kurun waktu 1991-1999. Penulis melihat perkembangan teknologi telepon seluler tersebut dari analog menuju digital dan menyimpulkan bagaimana asumsi

pengguna telepon genggam pada tahun tersebut. *Kedua*, pembahasan kehadiran ponsel sebagai gaya hidup yang memunculkan ketegangan kelas dan berakibat pada tindakan kriminal dengan menggandakan nomor SIM. Hal itu dilakukan oleh mahasiswa di Surabaya, yang dalam teori *consumer culture* sebagai *lifestyling* (hidup yang menggaya atau “*nggayani*”). *Ketiga*, menempatkan ponsel dalam kelas menengah. Dalam bagian ini penulis menjelaskan definisi kelas menengah di Indonesia dan bagaimana posisi ponsel sebagai bagian dari gaya hidup di tengah konsumsi gaya hidup yang lain.

METODE

Riset yang dilakukan dalam artikel ini menggunakan metode riset kepustakaan. Selain melakukan pemetaan, pendataan, dan penggambaran mengenai kemunculan ponsel melalui media massa nasional, khususnya *Kompas* dari tahun 1991-1999, penulis juga menjelaskan gaya hidup yang muncul selama periode rezim Orde Baru tersebut. Pencarian informasi ini kemudian dikuatkan dengan studi literatur, yaitu eksplorasi jurnal dan buku yang terkait dengan isu tersebut dengan melakukan perbandingan untuk mempertajam isu yang dianalisis. Merujuk kepada Cooper (1988), studi literatur digunakan untuk pendataan berbagai laporan utama, baik secara verbal maupun tertulis. Studi literatur ini bisa saja berbentuk empiris, teoretis, kritik/analisis, ataupun metodologi. Melalui dua hal tersebut, kemudian penulis menarik benang merah atas penjabaran dan analisis yang dikemukakan agar mendapatkan hasil analisis yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga penjelasan yang dibahas dalam analisis. Pertama, ponsel dalam rezim Orde Baru berupa penggunaan ponsel dari sistem analog menuju digital memberikan dampak terhadap murahnya harga ponsel sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia bisa menggunakannya. Meskipun diakui, penggunaan ponsel masih terbatas oleh kelas menengah. Kedua, ketegangan kelas dan hidup “*nggayani*”, yaitu penggunaan ponsel yang terbatas pada kelas menengah telah memunculkan kecemburuan sosial kemudian masyarakat mencari cara agar dapat menggunakannya sama seperti kelas menengah tersebut. Di sini, ketegangan kelas yang diwujudkan melalui pembajakan dan kloning nomor ponsel pun menjadi marak. Korbannya adalah tokoh-tokoh penting Indonesia. Ketiga, kelas menengah, gaya hidup, dan ponsel. Selain adanya pemaparan munculnya kelas menengah era rezim Orde Baru, juga dijelaskan mengapa kota-kota besar di Jawa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya.

Ponsel dalam Rezim Orde Baru

Dalam konteks negara-negara maju, khususnya Eropa, telepon genggam ditemukan pada 3 April 1973 oleh Martin Cooper, karyawan Motorola. Ide yang dicetuskan oleh Cooper ini adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Awalnya, Cooper melakukan eksperimen dengan memasukkan semua material elektronik ke dalam alat berukuran kecil. Eksperimen tersebut akhirnya menghasilkan ponsel pertama dengan total bobot seberat dua kilogram. Biaya

produksi yang diperlukan Motorola untuk memproduksi penemuan Cooper tersebut mencapai setara US\$ 1 juta. Temuan Cooper ini disempurnakan oleh Amos Joel Jr, seorang ahli teknik elektronika dari Massachusetts Institute of Technology. Ia membuat sistem *switching* ponsel dari satu wilayah sel ke wilayah sel lain yang bekerja ketika pengguna ponsel bergerak sehingga pembicaraan tidak terputus (Budiono, 2013: 94). Namun, ada pendapat yang mengatakan bahwa justru konsep seluler itu sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Lab Bell AT&T di Amerika Serikat. Pengujian sistem tersebut dinamakan *advanced mobile phone system* (AMPS) yang dilaksanakan di Chicago pada tahun 1978. Berdasarkan konsep Bell, telepon seluler diperkenalkan di Amerika Serikat dan Eropa sejak awal tahun 1980-an (*Kompas*, 21 Mei 1993).

Dalam kurun waktu 10 tahun setelah penemuan ponsel tersebut, tepatnya tahun 1984, teknologi seluler pertama hadir di Indonesia dengan berbasiskan teknologi *nordic mobile telephone* (NMT). Kehadiran telepon seluler ini adalah bagian dari pembangunan Pelita V yang dicanangkan oleh rezim Orde Baru. Harapannya, pada akhir Pelita V ini akan terpasang 3 juta satuan sambungan telepon (SST). Pengadaan sarana telekomunikasi ini merupakan konsekuensi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya, pada Pelita IV setiap tahun terpasang 60 ribu satuan sambungan telepon dan pada awal Pelita V jumlah tersebut meningkat menjadi 400 ribu (*Kompas*, 3 Juli 1991). Pada tahun itu pula, ada dua teknologi seluler yang digunakan, yaitu NMT-470, modifikasi dari NMT-450 dan AMPS-900. Rentang

tahun 1988-1992 telepon seluler mulai beredar di Indonesia, meskipun dengan jumlah yang terbatas (Anwar, 2010). Jumlah telepon seluler saat itu tidak lebih dari 30.000-40.000 buah (*Kompas*, 5 Mei 1995). Salah satu orang yang memiliki telepon genggam yang terbatas adalah advokat hukum terkenal, yaitu Otto Cornelis Kaligis, yang biasa dikenal dengan singkatan O.C. Kaligis. Hal ini terlihat dengan adanya surat pembaca yang dituliskannya sebagai bentuk keluhan atas telepon genggam yang saat itu belum sebulan dibeli tetapi sudah tidak bisa digunakan pada *Kompas* 8 Maret 1992.

Redaksi Yth: "Handphone" Tak Berfungsi

Tertarik dengan pada iklan besar-besaran handphone Motorola, kami membeli dan berhasil mendapatkan tipe T.A.C. 950, pada tanggal 17 Februari 1992. Belum sampai sebulan, handphone tersebut sudah tak dapat difungsikan, karena, katanya harus bayar pula.

Mau bayar ke PT Elektrindo Nusantara, ditolak. Katanya, administrasi mereka masih kacau balau, dan mereka tidak dapat menolong dan memberi keterangan. Kemana kami harus bayar pulsa handphone No. 082-100-5775?

*O.C. Kaligis
Jakarta.*

Pada akhir 1993 PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital *Global System for Mobile* (GSM). Proses ini dimulai di Pulau Batam dengan 6.000 satuan sambungan. Pada perkembangan berikutnya, jaringan milik Telkomsel yang bekerja pada frekuensi 900 MHz, ini akan dikembangkan di Pekanbaru dan Medan. Setelah itu,

Telkomsel mengembangkan jaringan tersebut di Pulau Jawa (*Kompas*, 9 Juni 1994). Karena pembangunan jaringan telekomunikasi memerlukan biaya yang tak sedikit, pemerintah pusat merasa perlu bekerja sama dengan perusahaan swasta dengan sistem bagi hasil atau hibah. Salah satu proyek dengan cara bagi hasil adalah dengan adanya proyek STBN yang melibatkan PT Central Indo Panca Sakti (*Kompas*, 3 Juli 1991). Namun, dalam konteks tahun tersebut, tetap saja harga dan pemasangan telepon genggam masih terbilang mahal untuk kebanyakan orang Indonesia. Apalagi saat itu, pemasangan proyek percontohan seluler GSM belum sampai di kota-kota besar.

Dengan masih menggunakan dua teknologi seluler analog, yaitu NMT-470 dan AMPS-900, harga telepon genggam masih belum bisa terjangkau oleh kebanyakan orang Indonesia. Sebagaimana diberitakan *Kompas* pada 23 Februari 1994 dengan judul “Keuntungan-Keluhan Pemilik Telepon

Genggam”. Untuk satu telepon genggam, termasuk biaya aktivasi, nomor, SLI, dan PPN, orang harus mengeluarkan uang Rp6.250 juta–Rp9.550 juta rupiah. Besaran rentang harga telepon genggam ini bergantung merek telepon genggam tersebut. Untuk harga termurah, orang bisa membeli telepon genggam Motorola Ultra Classic atau Ultra Sleek dan NEC P100 dengan harga Rp6.250 juta. Sementara untuk merek Ericsson, Nokia, dan Benefon, orang harus mengeluarkan uang sebesar Rp9.550 juta. Harga menengah di antaranya adalah NEC P600 dan Motorola 9800 XL, yaitu Rp7 juta rupiah. Hal ini belum termasuk pulsa, Rp100/pulsa (1 pulsa = 15 detik), sehingga 1 menit dihitung menjadi Rp400 rupiah dan termasuk biaya abondemen bulanan Rp41.250. Kurs 1 dolar saat itu adalah Rp2.000 dan harga bensin Rp700. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat tabel I di bawah ini yang dirilis oleh *Kompas* sebagai harga resmi telepon genggam pada tahun 1994.

Harga ponsel yang tertera dalam

TABEL I DAFTAR HARGA TELEPON GENGGAM TAHUN 1994

No	Telepon Genggam	Seri	Harga
1	Motorola	Ultra Classic	Rp. 6, 250 juta
		Ultra Sleek	Rp. 6, 250 juta
		9800 XL	Rp. 7 juta
		Micro TAC Gold 1950	Rp. 8 juta
		Micro TAC II (bisa dilipat)	Rp. 9 juta
		Micro TAC Ultralite Vibration (model terbaru: berdering dan bergetar)	Rp. 9,5 juta
2	NEC	P100	Rp. 6, 250 juta
		P600	Rp. 7, 041. 250 juta
3	Ericsson		Rp. 6, 250 juta
4	Nokia		Rp. 9, 550 juta
5	Benefon		Rp. 9, 550 juta

Sumber: *Kompas*, 23 Februari 1994

tabel tersebut masih harga normal atau harga yang belum sampai ke toko. Hal ini terjadi karena apabila sudah sampai di toko, justru harganya bisa melonjak dua kali sampai empat kali lipat. Di toko, orang bisa mengeluarkan uang untuk sekadar membeli nomor bagus seharga 14 juta rupiah. Sementara itu, untuk telepon genggam, ia harus mengeluarkan Rp14 juta rupiah. Total uang yang harus dibayarkan Rp28 juta (*Kompas*, 23 Februari 1994). Mahalnya harga satu buah telepon genggam ini disebabkan banyaknya permintaan, tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas yang tersedia. Maksudnya, banyak masyarakat dari berbagai latar belakang ingin menggunakan telepon genggam dengan beragam alasan. Namun, seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk memiliki telepon genggam, infrastruktur yang dibangun belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Sebagaimana ditegaskan oleh Hamid Mochdar (*Service Manager*, PT Elektrindo Nusantara), saluran untuk menyambungkan telepon genggam tersebut, yaitu *remote base station* (RBS) belum memenuhi kapasitas. Akibatnya, apabila ada anggota masyarakat yang ingin membeli telepon genggam, mereka harus menunggu dibangun kembali RBS di beberapa titik (*Kompas*, 23 Februari 1994).

Sementara itu, RBS adalah antena yang menangkap pancaran gelombang radio dari telepon genggam untuk diteruskan ke sentral, yang kemudian diarahkan ke nomor tujuan yang dipanggil. Di sini, satu RBS bisa terdiri atas 60 kanal, 70 kanal, dan 88 kanal. Setiap kanal mampu menampung 18-22 pembicara pada saat yang sama. Dengan demikian, 88 kanal bisa menampung 88 X 22 pembicaraan =

1. 936 pembicaraan secara bersamaan. Untuk wilayah Jakarta, misalnya, PT Elektrindo Nusantara memiliki 23 RBS, sedangkan total jumlah pelanggan jasa STBN (sambungan telepon bergerak nasional) saat itu mencapai 27.500 pelanggan. Untuk menambah jumlah pelanggan, Elektrindo harus menambah jumlah RBS. Di sisi lain, pembangunan RBS tidak bisa cepat karena menyangkut banyak hal, khususnya biaya dan fasilitas. Untuk satu RBS yang terdiri atas 88 kanal, PT Elektrindo harus mengeluarkan uang sekitar Rp22 milyar dan membutuhkan ruang khusus seluas 5 X 10 meter untuk tempat rak-rak yang nanti disewakan. Dengan demikian, telepon genggam bekas pun menjadi mahal. Hal ini terjadi karena, yang dipersoalkan bukan teleponnya melainkan nomornya. Lebih jauh, harga telepon menjadi bertambah mahal justru saat menjelang momen-momen perayaan besar di Indonesia, baik itu hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Anggota masyarakat ingin segera mendapatkan telepon genggam tersebut secara cepat. Tampaknya, telepon digunakan sebagai sebuah simbol keberhasilan saat mereka kembali ke kampung halaman ataupun bertemu dengan teman dan para tetangga sebaya (*Kompas*, 23 Februari 1994).

Pada tahun 1994, melalui kerja sama pemerintah Indonesia, PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo) beroperasi sebagai operator GSM pertama di Indonesia, yang awal kegiatan operasinya berada di Jakarta dan wilayah sekitarnya (Anwar, 2010). Dibandingkan dengan dua teknologi yang digunakan sebelumnya, NMT-470 dan AMPS-900, GSM digadang-gadang akan lebih baik. Selain sistem yang digunakan bukan lagi analog, melainkan digital, bisa digunakan untuk komunikasi data,

sistem keamanan informasi tinggi, dan unggul dalam pelayanan *features* pada *out station*-nya, GSM memiliki kualitas suara yang lebih baik dan memiliki sistem acak yang nantinya tidak dapat dilacak oleh para pencuri frekuensi. Lebih jauh, kehadiran GSM membuat orang mudah membeli telepon genggam yang praktis serta bisa *roaming* internasional. Hal ini membuat pemilik SIM Card GSM bisa menggunakannya di mana saja di dunia sepanjang ada kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Di Batam, misalnya, dengan modal tak sampai Rp1 juta, orang menunggu tak lebih dari satu jam untuk mendapatkan satu nomor telepon. PT Telkom pun hanya menjual kartu yang disebut dengan SIM (*subscriber identity module*), yang berisi PIN (*personal identification number*). Kartu tersebut berisi nomor pelanggan yang tidak bisa dicontek (*Kompas*, 9 Juni 1994; *Kompas*, 19 Juli 1994).

Dengan demikian, perubahan teknologi dari analog ke digital secara cepat dengan adanya GSM membuat harga telepon genggam menjadi relatif lebih murah. Hal ini bisa dilihat dengan harga ponsel yang dikelola oleh PT Satelindo. Menurut pemberitaan *Kompas* pada 21 September 1994, harga telepon genggam yang dibandrol oleh PT Satelindo paling murah adalah Motorola Microtac 5200 lipat, Ericsson GH 198, Alcatel 9109 HB100, Nokia 1011, Philipis PR810, dan Siemens dengan harga sekitar Rp3.950.000. Walaupun ada yang termahal, itu pun masih di bawah ponsel analog, yaitu Rp5.950.000,00 untuk merek Ericsson GH 337 dan Nokia 2110 yang beratnya tidak sampai 200 gram. Harga jual tersebut sudah termasuk biaya pasang sebesar Rp1 juta, PPN, dan harga kartu SIM. Pengoperasiannya

menggunakan PIN dan dikenakan biaya abonemen pada bulan pertama. Meskipun demikian, khusus untuk pelanggan Satelindo yang meliputi area Jakarta dan sekitarnya, pelanggan tetap dikenakan tarif lebih untuk membayar pulsa minimum Rp62.500,00 dan biaya frekuensi Rp100.000,00 per tahun (*Kompas*, 21 September 1994).

Ketegangan Kelas dan Hidup “Nggayani”

Meskipun dianggap lebih murah pada masa itu, minat masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta terhadap ponsel GSM tidak sesuai harapan diharapkan. Dari target pemasaran 30.000 GSM oleh PT Satelindo, misal, hingga akhir tahun 1994 (1 September-15 November) baru terjual 10.000 buah dan baru 2.000 buah yang sudah diserahkan kepada pemiliknya (*Kompas*, 14 November 1994). Selain persoalan teknis dan pemasaran untuk menyosialkan, ponsel GSM, tampaknya, relatif masih mahal untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Tidak terjangkaunya harga ponsel tersebut menyebabkan kecemburuan kelas sosial. Hal ini terlihat dengan adanya “pencurian” pulsa melalui pembajakan nomor serial elektronik yang terdapat dalam GSM di berbagai daerah (Jakarta, Bandung, dan Surabaya) dengan cara melakukan penggandaan. Maksud penggandaan di sini ada tiga motif. Pertama, pembajakan di jalan. Saat ponsel diaktifkan, pancaran-pancaran elektronik yang dikeluarkan telepon genggam tersebut dibaca alat bajak yang disebut *ESN Reader*. Melalui alat inilah pencuri mengetahui nomor serial elektronik yang bisa dipindahkan ke telepon genggam yang kosong. Kedua, pemilik telepon genggam membawa miliknya tersebut ke tukang reparasi tidak resmi. Tukang reparasi

inilah yang kemudian mengopi nomor serial elektronik tersebut yang kemudian dipindahkan ke dalam telepon genggam lain yang kosong. Ketiga, penggandaan tersebut dilakukan secara sengaja oleh pemiliknya agar bisa dipakai oleh istri, suami, dan anaknya. Pencurian/penggandaan ini memungkinkan terjadi karena jaringan telepon genggam GSM menggunakan perantara udara (*air interface*) (*Kompas*, 6 Mei 1995).

Pembajakan ini dapat diartikan dua hal. Pertama, munculnya disparitas kelas, maksudnya, masyarakat kelas bawah. Dalam hal ini masyarakat kebanyakan tidak mampu membeli ponsel tersebut. Ketidakmampuan ini membuka ruang untuk merebut materi yang memang tidak mereka miliki sebagai bentuk perebutan ekonomi. Dalam hal ini, kecemburuan kelas bisa masuk dalam pengertian ini. Kedua, tindakan yang disebut oleh Gerke (2000) sebagai *lifestyling* (hidup yang menggayakan, atau “*nggayani*”). Istilah hidup yang “*nggayakan*” ini merujuk pada hasrat mengonsumsi suatu barang jasa yang berkelas, tetapi kemampuan ekonominya tidak mendukung. Oleh karena itu, selain mengonsumsi barang-barang tiruan, cara agar orang dapat menggunakan barang tersebut sesuai dengan kemampuan ekonominya adalah melakukan tindakan pencurian pulsa dan penggandaan. Di satu sisi, upaya untuk melakukan *lifestyling* ini cukup banyak diminati oleh masyarakat yang ingin memiliki dan menggunakan ponsel. Pasar inilah yang kemudian dimainkan oleh mereka yang mengerti teknik pencurian pulsa dan penggandaan.

Akibat *lifestyling* tersebut banyak pengguna ponsel menjadi korban. Mereka yang menjadi korban tidak hanya terdiri atas para pengusaha, dan

kelompok kelas menengah atas lainnya, melainkan juga pejabat negara, pemda, dan petinggi militer. Untuk konteks Surabaya, misalnya, Basofi Soedirman (Gubernur Jawa Timur), Laksda TNI Gofar Suwarno (Panglima Armada RI Kawasan Timur/Pangarmatim), Brigjen TNI Farid Zainuddin (Kasdam V Brawijaya) adalah beberapa orang penting yang menjadi korban pencurian dan penggandaan telepon genggam. Pelakunya kebanyakan masih berstatus mahasiswa. Meskipun sudah memunculkan korban, pihak Telkomsel sebagai penyelenggara dan pengelola telepon genggam tersebut tampaknya kebingungan mengantisipasi tindakan yang dianggap kriminal tersebut. Hal ini terjadi karena secara teknis penggandaan nomor telepon genggam tersebut, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sangat tidak mungkin terjadi dalam teknologi digital seperti GSM (*Kompas*, 13 Februari 1995; 27 Februari 1995).

Pencurian pulsa dan penggandaan telepon genggam sebagai bentuk kecemburuan kelas dan hidup *nggayani* ini diamini oleh Joop Ave, Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, khususnya dalam mengamati kelas menengah yang menggunakan ponsel. Bahkan, ia sempat menggelengkan kepala ketika suatu kali melihat ada dua orang yang duduk di satu meja di restoran mewah berbicara lewat telepon genggam mereka. Mereka saling bertelepon dengan maksud agar orang sekitar tahu bahwa mereka memiliki telepon genggam. Selain itu, dalam kondisi yang berbeda, alih-alih langsung mengangkat saat ponselnya berdering, seseorang biasanya dengan sangat bangga membiarkan ponselnya berbunyi agak lama di depan umum sehingga orang

lain di sekitarnya akan mendengarkan (*Kompas*, 5 Mei 1995; 6 Mei 1995). Dengan kata lain, pengalaman Joop Ave ini menggambarkan bagaimana perlakuan masyarakat terhadap ponsel dan bagaimana mereka meraih status lewat penggunaan yang sering tidak bisa dicapai oleh kelas sosial di bawahnya.

Ungkapan Joop Ave ini dikuatkan oleh Sri Hoedjo Sontokusumo, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur. Menurutnya, perilaku pemilik ponsel saat itu sudah sangat berlebihan. Ponsel yang awalnya efisien digunakan oleh para pelaku bisnis, kini dikembangkan sebagai alat pamer yang malah menimbulkan ekses negatif, yaitu mengganggu kelancaran informasi. Lebih jauh, menurutnya, kehadiran ponsel mengakibatkan terjadinya penerapan konsumsi yang berlebihan. Orang memiliki ponsel sekadar untuk pamer. Kecenderungan pamer ini membuat orang bicara apa saja, asal terlihat oleh orang lain ia sedang menggunakan ponsel. Akibatnya, terjadi pemakaian frekuensi yang tidak wajar. Hal itu berdampak pada terhambatnya ponsel milik orang lain karena sirkuitnya penuh dan pembicaraan pun terputus. Bila mau membandingkan, kondisi ini tidak pernah ia lihat di negara-negara maju yang justru jumlah kepemilikan ponsel jauh lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Meskipun demikian, bagi PT Telkomsel, diwakili oleh Andhyka F. Gumelar, hal yang dilarang dalam *Memorandum of understanding global system for mobile communication* adalah bukan memamerkan ponsel di publik, melainkan memegang ponsel sambil mengemudi mobil. Hal ini disebabkan, satu tangan memegang ponsel dan tangan

lainnya memegang setir serta persneling akan membahayakan pengemudi. Akan tetapi, perilaku seperti itu secara keseluruhan, ia setuju, pendapat yang dikemukakan oleh dua orang tersebut sebelumnya (*Kompas*, 5 Mei 1995).

Kelas Menengah, Gaya Hidup, dan Ponsel

Pembahasan sebelumnya dapat menjadi gambaran bahwa ponsel menempati posisi signifikan bagi kalangan kelas menengah Indonesia sebagai barang yang dikonsumsi. Ponsel tidak semata-mata memudahkan komunikasi dan efisiensi waktu, tetapi dijadikan sebagai gaya hidup bagi kelas menengah atas. Namun di satu sisi, sebagai hidup *nggayani*, kebanyakan masyarakat Indonesia tak mampu untuk membelinya. Namun, apa sebenarnya definisi kelas menengah itu, khususnya dalam rezim Orde Baru? Kategori apa yang digunakan untuk menyebutkan seseorang sebagai bagian dari kelas menengah? Hal apa saja yang dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup kelas menengah? Bagian ini mencoba melihat tiga pertanyaan tersebut dengan mengaitkan ponsel sebagai bagian dari gaya hidup yang kerap luput dalam pembahasan studi-studi mengenai kelas menengah dalam rezim Orde Baru. Secara umum, analisis kelas menengah berpijak pada dua hal: produksi dan konsumsi. Dua hal inilah yang kerap dihitung oleh Bank Dunia untuk mengukur tingkat kesejahteraan negara, kota, daerah, desa, keluarga, dan individu. Dalam ranah konsumsi, seseorang dikatakan sebagai kelas menengah apabila ia mampu membelanjakan uang sehari dalam kisaran USD 2-20. Sementara itu, dalam ranah produksi, seseorang

dikatakan sebagai kelas menengah apabila mendapatkan penghasilan antara USD 100-1000 per bulan (Van Klinken, 2014: 1-2).

Lebih jauh, munculnya kelas menengah di Indonesia dalam rezim Orde Baru, sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall (1996: 183-1984) bisa dilihat pada dua momen. Keduanya saling terkait dan memiliki konsekuensi sosial yang menciptakan kelas menengah baru, yaitu ledakan ekonomi minyak bumi (*oil boom economic*) pada tahun 1965 dan 1990. Pada tahun 1965, pemerintah Indonesia dan pejabat militer yang dekat dengan rezim Orde Baru menikmati kekayaan dari hasil kekayaan minyak bumi. Di sini, muncul kelas menengah yang diisi oleh keluarga rezim pemerintah Soeharto, orang-orang birokrasi yang dekat dengannya, khususnya yang tergabung dalam Partai Golkar, serta Wakil Presiden Soedharmono. Di sisi lain, momen ini membuat militer secara institusional, secara ekonomi mengalami penurunan, meskipun mengalami penguatan kembali. Hasil momen tersebut kemudian digunakan untuk pengembangan riset dan transformasi teknologi dengan dipanggilnya BJ Habibie untuk kembali ke Indonesia. Sementara itu, pada tahun 1990, setelah turunnya perekonomian Indonesia yang dihasilkan oleh minyak bumi pada tahun 1980-1989-an akhir, momen ledakan hadir kembali seiring dengan makin terbukanya Indonesia pada pasar kapitalisme global yang memaksa terbukanya arus demokratisasi lebih kencang dan adanya privatisasi sektor perusahaan dan perekonomian yang selama ini dipegang dan terpusat pada pemerintah. Berbeda dengan tahun 1965, pada tahun 1990-an kelas menengah (baru) di Indonesia semakin banyak

dan menyebar yang berdampak pada munculnya gaya hidup kelas menengah. Hal itu ditambah dengan hadirnya fasilitas pasar yang dapat mengekspresikan budaya konsumen kelas tersebut, seperti pusat perbelanjaan mewah Pondok Indah Mall dan Plaza Indonesia, diskotek, perumahan mewah, dan kursus golf.

Menurut Heryanto (1999: 165), sebenarnya tidak mudah mendefinisikan istilah kelas menengah di Indonesia sebagai elemen orang kaya baru (OKB). Hal ini terjadi karena setiap pengategorian yang dibuat berimplikasi terhadap kategori-kategori lain. Sementara itu, pendefinisian terhadap orang sering mengalami perubahan dan tidak tetap. Namun, menurutnya, kelas menengah secara sederhana bisa didefinisikan sebagai orang urban, berpendidikan dengan ekonomi relatif baik, secara struktural sedikit menempati kelas agak borjuis, seperti, intelektual, seniman, birokrat, manajer, ataupun profesional teknis dalam berbagai bidang. Namun, berkaca pada kedua tulisan Heryanto (1996 & 1999), kelas menengah dapat diartikan pada dua hal, yaitu kelas sosial yang membentuk perlawanan dan kelas sosial yang mengekspresikan gaya hidup sebagai bagian budaya konsumsi. Kedua definisi ini digunakan untuk menjelaskan posisi kelas menengah Indonesia. Oleh karena itu, menurut Heryanto (1999: 179), dalam menempatkan gaya hidup, kelas menengah Indonesia pada tahun 1990-an tidak semata menempatkan budaya konsumsi sebagai bagian dari kehidupan hedonis, tetapi bagian dari titik krusial dalam mengontruksikan, menegosiasikan, dan mengontestasikan identitas orang Indonesia. Lebih jauh, dalam taraf tertentu, sama persis sebenarnya,

dengan mendefinisikan orang kelas menengah dalam berbelanja di mal.

Sementara itu, kelas menengah sebagai praktik gaya hidup ditandai dengan kehadiran mal sebagai ruang publik konsumsi baru untuk mengekspresikan hasrat berbelanja mereka pada tahun 1990-an. Secara detail dijelaskan oleh Van Leeuwen (2011) bahwa hal tersebut, bukan berarti menandakan bahwa mal adalah bagian dari identitas mereka sebagai kelas menengah. Di dalam mal, orang-orang kelas menengah, khususnya di Jakarta dan sekitarnya, mengalami perasaan terancam dengan kehadiran bentuk praktik-praktik baru dalam berkonsumsi seiring dengan pendapatan ekonomi yang dimiliki. Meskipun dalam ekspresi publik mereka tampak menikmati. Lebih jauh, alih-alih mengalami semacam kebebasan dan ekspektasi baru di dalam mal, orang kelas menengah justru mengalami perasaan terancam terhadap barang-barang yang ada dengan merefleksikan diri mereka dan pendapatan ekonomi mereka. Di sisi lain, kemunculan kelas menengah muslim yang ditandai dengan maraknya pengajian dan kursus agama Islam, kehadiran tren busana muslim, dan adanya bank Islam menandakan adanya bentuk negosiasi Islam dengan modernitas di tengah melunaknya politik kontrol rezim Orde Baru, yang sedang berproses mencari dukungan politik dari arus Islam setelah dukungan militer terbelah.

Kondisi di atas tidak berlaku untuk pengguna ponsel. Meskipun ponsel adalah barang baru bagi kelas menengah Indonesia dalam rezim Orde Baru, hal itu bukan menjadi materi yang membuat pemiliknya memiliki perasaan terancam seperti dengan mendatangi mal. Meskipun diakui,

fungsi ponsel sebagai alat komunikasi berubah seiring dengan naiknya gengsi kelas menengah di mata publik saat mereka membawa ponsel. Dalam hal ini, bagi kelas menengah, dengan jumlah pemakai yang tak banyak, memiliki ponsel adalah praktik pendefinisian dari kelas menengah yang seakan menjadi bagian dari status kelas elit di Indonesia yang sudah ada sejak rezim Orde Baru berkuasa. Bila bercermin pada temuan Barker (2002 & 2008) mengenai interkom sebagai alat komunikasi, sosialisasi, dan ruang publik baru, ketidakasingan terhadap ponsel bagi kelas menengah tersebut menjadi beralasan.

Upaya untuk menjadi bagian kelas menengah dan kelas elit atas dengan memiliki ponsel kemudian dipraktikkan oleh sebagian anggota masyarakat sebagai bentuk upaya hidup "*nggayani*" (*lifestyling*). Hidup "*nggayani*" dalam konteks kelas menengah dalam rezim Orde Baru, bagi penulis dapat diartikan sebagai bentuk pamer dan gengsi dengan menunjukkan eksklusivitas bahwa mereka bagian dari kelas tertentu yang berbeda dibandingkan dengan kelas kebanyakan. Sementara itu, hidup "*nggayani*" bagi kebanyakan masyarakat adalah melakukan peniruan gaya seperti kelas menengah tersebut. Namun, karena dari segi ekonomi tidak mampu, mereka mencari peniruan tersebut dengan mengonsumsi barang-barang tiruan, bekas, ataupun hasil tindakan mencuri atau kriminal. Dalam proses hidup saling "*nggayani*" inilah ketegangan kelas antara kelas menengah baru dan juga kelas bawah kebanyakan muncul. Kehadiran ponsel merupakan satu indikator di antara indikator lainnya mengenai ketegangan kelas tersebut.

Ketegangan kelas tersebut bukanlah sesuatu yang tiba-tiba

ada, melainkan adanya proses panjang yang diciptakan oleh rezim Orde Baru seiring dengan naiknya perekonomian Indonesia melalui ledakan minyak bumi. Karena hal itu merupakan bentuk rekayasa, penciptaan kelas menengah tidak dibuat merata melainkan hanya segelintir dan terpusat. Akibatnya, rezim Orde Baru menciptakan disparitas antara Jawa dan luar Jawa, yang kemudian dalam publik Indonesia terkenal dengan stereotip Jawa Sentris. Disparitas ini ditandai dengan menumpuknya pusat perekonomian dan kekuasaan di Jakarta sebagai representasi Pulau Jawa yang ditandai dengan berbagai pembangunan dan infrastruktur. Akibatnya, kondisi tersebut menciptakan kesenjangan antara pusat dan daerah. Adanya jarak ini berdampak tidak hanya dalam perekonomian dan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa melainkan juga terhadap imajinasi mereka. Bagi Aceh dan Papua yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, disparitas itu diimajinasikan sebagai ketidakadilan pusat kepada daerah. Namun, di beberapa daerah yang lain, disparitas memunculkan imajinasi dan hasrat untuk mengikuti bagian dari pusat (*center*). Ini dilakukan agar tidak terlihat tertinggal dalam berbagai hal. Dalam konteks ini, hidup "*nggayani*" untuk mengikuti pusat dengan mengonsumsi dan mempraktikkan berbagai hal yang ada di Jakarta menunggu saat yang tepat.

SIMPULAN

Ponsel sebagai alat komunikasi bukanlah suatu hal yang baru bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Praktik berkomunikasi menggunakan teknologi ini dengan ragam bentuknya bisa dilihat sejak era kolonial Belanda, di bawah kepemimpinan Soekarno,

dan Soeharto. Namun, kehadiran ponsel dalam rezim Orde Baru tidak lagi diartikan sebagai alat komunikasi yang memudahkan orang untuk mendapatkan informasi dan saling mengabarkan tanpa perlu jalinan kabel, melainkan sebagai bagian dari hidup "*nggayani*." Munculnya praktik hidup yang *nggayani* tersebut juga bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, melainkan adanya kelas menengah yang diciptakan oleh rezim Orde Baru seiring dengan adanya ledakan minyak bumi yang membuat pemerintah Indonesia tiba-tiba memiliki sumber ekonomi yang berlimpah pada tahun 1965 dan 1990. Penciptaan kelas menengah yang hanya berpusat di Jawa menciptakan disparitas kelas dan gaya hidup yang berdampak pada adanya hasrat untuk mengikuti upaya menjadi bagian dari kelas menengah yang berpusat di Jawa, khususnya Jakarta.

Meskipun demikian, kehadiran ponsel dalam rezim Orde Baru tidak dapat dijadikan referensi untuk melihat gerakan sosial. Hal itu seiring dengan minimnya teknologi fitur seperti ponsel pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penyebaran pesan dan akses internet sebagai alat diseminasi informasi yang menjadi bagian dari gerakan sosial kelas menengah di Indonesia pascarezim Orde Baru. Hal ini juga berbeda ketika menempatkan internet yang dijadikan studi sebagai bagian dari gerakan sosial di Indonesia. Di sisi lain, kehadiran ponsel dengan ragam merek dan teknologi ikutan yang dibawa telah menciptakan demokratisasi di Indonesia melalui kehadiran media sosial. Kasus *#CoinForPrita*, *#SaveKPK*, dan *#CicakVersusBuaya* adalah salah satu contoh tersebut. Dengan kata lain, perkembangan ponsel pascarezim Orde Baru memiliki dinamika yang jauh lebih

luas dan tidak terbatas hanya sebagai gaya hidup kelas menengah. Ditambah lagi dengan kehadiran ponsel-ponsel dari Cina dengan sistem android membuat harga ponsel relatif jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akibatnya, ponsel tidak lagi memiliki nilai kemewahan individu bagi orang yang memilikinya.

Di tengah keterbatasan tersebut, studi ponsel dalam rezim Orde Baru ini dapat dijadikan awal kajian sebagai bagian dari sejarah sosial dan praktik konsumsi kelas menengah keberadaan ponsel pascarezim Orde Baru seolah-olah menjadi suatu hal yang baru dan terputus dari periode sebelumnya. Hal ini tecermin dari sejarah munculnya ponsel dan perubahan dari analog ke digital di Indonesia. Selain itu, muncul juga ketegangan kelas terkait kehadiran ponsel dengan adanya pencurian dan penggandaan nomor ponsel dalam rezim Orde Baru. Bila ditelisik lebih jauh, kasus tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan kehadiran ponsel Blackberry Messenger (BBM) pascarezim Orde Baru, dengan harga ponsel masih terbilang mahal dan kasus pencurian ponsel semakin marak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. (1996). "The broadening base of political opposition in Indonesia", dalam Garry Rodan (editor), *Political Opposition in Industrialising Asia*, Routledge: London and New York.
- Barendregt, Bart. (2009). 'Mobile Religiosity In Indonesia: Mobilized Islam, Islamized Mobility and the Potential of Islamic Techno Nationalism,' dalam E. Alampay (ed.), *Living the Information Society In Asia*, Singapore: ISEAS.
- Barker, Joshua. (2002). "Telephony at the Limits of State Control: 'Discourse Networks' in Indonesia," *Local Cultures and the 'New Asia'*. *The State, Culture and Capitalism in Southeast Asia*. C.J.W.-L. Wee (ed.). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. pp.158-183.
- Barker, Joshua. (2008). "Playing with publics: Technology, talk and sociability in Indonesia." *Language and Communication* 28: 127-142.
- Cooper, H. M. (1988) 'The structure of knowledge synthesis' *Knowledge in Society*, vol. 1, pp. 104-126.
- Gerke, Solvay. (2000). "Global Lifestyeles under Local Conditions: The New Indonesian Middle Class", dalam Chua Beng Huat (editor), *Consumption in Asia: Lifestyles and identities*, Routledge: London and New York.
- Heryanto, Ariel. (1996). "Indonesian middle-class opposition in the 1990s", dalam Garry Rodan (editor), *Political Opposition in Industrialising Asia*, Routledge: London and New York.
- Heryanto, Ariel. (1999). "The years of living luxuriously Identity politics of Indonesia's new rich, dalam Michael Pines, *Culture and Privilege in Capitalist Asia*, Routledge: London and New York.
- Hill, David T & Khrisna Sen. (2005). *The Internet in Indonesia's New Democracy*, Routledge: London and New York.
- Ishadi SK. (2014). *Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, Jakarta: Gramedia
- Kitley, Philip. (2000). *Television*,

- Nation, and Culture in Indonesia, United State of America: the Ohio University Center for International Studies.*
- Lim, M. (2005). *Archipelago Online: The Internet and Political Activism in Indonesia*. Tesis Doktor. University of Twente, Belanda.
- Lim, M. (2006). *Cyber-urban activism and the political change in Indonesia*. Eastbound, 1 (1), 1-19.
- Sen, Khrisna. (1994). *Indonesian Cinema: Framing the New Order*, Zed, London
- Van Klinken, Gerry. (2014). "Introduction: Democracy, Markets, and the Assertive Middle", dalam Gerry Van Klinken dan Ward Berenschot (editor), *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*, Brill: London-Boston.
- Van leeuwen, Lizzy. (2011). *Lost in Mall: An Ethnography of Middle-Class Jakarta in the 1990s*, KITLV: Leiden.
- Media Massa dan Online**
- Anonim. (1991). "Menparpostel: Akir Pelita V Akan Terpasang 3 Juta SST", Kompas, 3 juli 1991.
- Anonim. (1992). "Redaksi Yth: 'Handphone' Tak Berfungsi", Kompas, 8 Maret 1992.
- Anonim. (1993). "Standar Sistem Telepon Bergerak Dijadwalkan Selesai Tahun Ini", Kompas, 21 Mei 1993.
- Anonim. (1994). "30.000 Satuan Sambungan Selular Akan Dipasarkan Di DKI Jakarta", Kompas, 4 Agustus 1994.
- Anonim. (1994). "Dengan GSM, Telepon Genggam Bisa Lebih Murah", Kompas, 19 Juli 1994.
- Anonim. (1994). "Harus Yakin Sebelum Pakai Ponsel", Kompas, 21 September 1994.
- Anonim. (1994). "Ingin Telepon Genggam, Tunggu GSM", Kompas, 9 Juni 1994.
- Anonim. (1994). "Keuntungan-Keluhan Pemilik Telepon Genggam", Kompas, 23 Februari 1994.
- Anonim. (1994). "Minat Masyarakat Akan GSM Ternyata Tidak Terlalu Tinggi", Kompas, 14 November 1994.
- Anonim. (1994). "Telepon Genggam, Yang Bekas Pun Mahal", Kompas, 23 Februari 1994.
- Anonim. 1995. "Jangan Gunakan Ponsel Secara Demonstratif", Kompas, 6 Mei 1995.
- Anonim. (1995). "Pengganda Telepon Genggam di Surabaya, Bandung, dan Jakarta", Kompas, 27 Februari 1995.
- Anonim. (1995). "Penggandaan Telepon Genggam Merajalela", Kompas, 13 Februari 1995.
- Anonim. (1995). "Ponsel dan Persaingan Merek", Kompas, 6 Mei 1995.
- Anonim. (1996). "Di Tempat Umum Jangan Menghidupkan Ponsel", Kompas, 5 Mei 1996.
- Anwar, Ifan. (2010). "Menelusuri Perkembangan Ponsel di Indonesia", www.kompas.com, 2010. Dikutip dari <http://tekno.kompas.com/read/2010/04/01/18352875/Menelusuri.Perkembangan.Ponsel.di.Indonesia>, pada 20 Agustus 2015.
- Budiono, Fahrizal Lukman. (2013). "Persepsi dan Harapan Pengguna Terhadap Kualitas Layanan Data pada Smartphone di Jakarta",

Bulletin Pos dan Telekomunikasi,
Vol. 11. No. 2 Juni 2013, hal. 93-
108.